

PREMANISME DAN PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Suwardi

Meningkatnya kualitas kejahatan akhir-akhir ini cenderung berkembang ke arah penggunaan kekerasan. Berbagai macam kejahatan yang timbul dengan modus operandi tertentu, makin menjadi "organized crime" yang berusaha membangun mitos "fear of violence" terhadap masyarakat, seperti premanisme. Premanisme digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan perilaku berdasarkan tujuan menghalalkan segala cara yang bermodus operandi menakut-nakuti korban supaya mau memberikan upeti tetap dengan imbalan jasa pengamanan, padahal rasa tak aman itu sendiri justru diciptakan oleh mereka sendiri. (Kompas, 20-3-1995).

Menurut ahli Psikologi dari Universitas Indonesia bahwa bahaya yang terbesar dari premanisme, justeru karena kemampuan preman menciptakan kontrol tandingan (counter control) melalui ketentuan hukum riil yang mampu mengimbangi ketentuan hukum resmi pemerintah. Oleh karena itu dalam operasinya mereka tak segan-segan melakukan ancaman, pemukulan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan sekalipun. Hal ini terbukti dengan pembunuhan seorang anggota Polri, Mahasiswa PTIK angkatan XXXI, Lettu Pol Budi Prasetyo, oleh kelompok preman di Jl. Melawai Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada tanggal 6 Maret 1995 lalu. Tindakan tersebut kiranya telah melampaui batas perikemanusiaan. Hukum dan keadilan kini terkoyak, porak poranda. Oleh sebab itu perlu adanya tindakan aparat berwenang untuk menegakkan hukum dan menyempurnakan keadilan demi terciptanya kelestarian keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa premanisme erat sekali berhubungan

dengan penggambaran perilaku seseorang. Perilaku adalah merupakan bagian dari kepribadian manusia. Dalam kajian psikologi, kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu teori yang membahas masalah faktor pengaruh kepribadian yaitu teori konvergensi yang dibuat oleh William Stern, ia berpendapat bahwa kedua faktor pengaruh kepribadian sebenarnya berpadu menjadi satu, saling memberi pengaruh. Tentang kekuatan yang manakah yang lebih menentukan, tentu saja tergantung kepada faktor mana yang lebih kuat diantara kedua faktor tersebut.

Dalam konteks kepribadian preman kiranya faktor eksternal (lingkungan) sungguh merupakan faktor pendorong yang lebih kuat. Hal ini acapkali teramati bahwa walaupun keras dan kejamnya intensitas gejala premanisme, namun masih lebih merupakan persoalan sosial, artinya masalah yang bertalian dengan urbanisasi, lebarnya kesenjangan, sempitnya lapangan kerja dan sikap timbang rasa masyarakat daripada tindak kejahatan murni. Keadaan itulah yang mengandung potensi rawan, menjadi faktor korelasi kriminogen (FKK) dalam menumbuhkan gejala premanisme yang dapat digolongkan sebagai bahaya laten. Oleh karena itu dilihat dari prosesnya premanisme merupakan suatu akibat dari sebab yang multi dimensi.

Masalah urbanisasi, sebetulnya telah menjadi masalah klasik di daerah perkotaan di Indonesia. Betapa tidak, dari tahun ke tahun gelombang urbanisasi terus berlangsung. Hal ini memang dapat dimaklumi, karena adalah pertimbangan ekonomi, maka pertumbuhan industri yang menyedot tenaga kerja praktis berada di kota-kota. Oleh sebab itu berlakulah

pribahasa "Ada gula ada semut". Angkatan kerja berbondong-bondong pergi ke daerah sentra industri. Mereka kebanyakan tanpa bekal keterampilan dan pengetahuan yang memadai mencoba untuk bersaing, sehingga ada yang terpelanting di sudut-sudut keramaian kota. Mereka hanya bisa melihat seraya menelan ludah berbagai kemewahan yang didemonstrasikan oleh masyarakat kota tanpa peduli. Oleh karena itu jadilah mereka "free man" yang konon merupakan asal kata dari istilah preman.

Data dari Biro pusat statistik periode 1980-1993 menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja laki-laki rata-rata sebesar 7,25 % pertahun, sedangkan angkatan kerja perempuan sebesar 14,92 % pertahun. Penyerapan tenaga kerja pada periode tersebut pada sektor primer (pertanian) menurun dengan rata-rata 2,9 %. Pada sektor tersier (perdagangan, keuangan, komunikasi, jasa dan kemasyarakatan) turun sebesar 0,6 % pertahun. Sedangkan pada sektor sekunder (pertambangan, manufaktur, listrik, gas, dan bangunan) naik 2,7 %. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa perbandingan antara pertumbuhan dengan penyerapan tenaga kerja tidak seimbang, sehingga menghasilkan "labour surplus" (kelebihan angkatan kerja). Hal ini dapat menjadikan embrio premanisme menemukan pijakan yang semakin kuat.

Di samping itu, diisuekan bahwa keberanian para preman dalam melakukan kegiatannya lebih memiliki daya hidup yang relatif permanen, karena kemampuan mereka menjalin hubungan dengan oknum aparat yang lama kelamaan menjadi bagian dari sistem penunjang (supporting system) keberadaan mereka. Faktor pengaruh inilah yang menjadi kepribadian preman selalu dapat mengaktualisasikan diri dengan meninggalkan bekas dan

pengalaman traumatis bagi setiap korbannya.

Mengamati awal timbulnya premanisme yang merupakan akibat dari berbagai sebab, maka untuk menetralsirkannya harus pula melibatkan berbagai lembaga baik yang ada dalam sistem pemerintahan maupun masyarakat. Penegakan hukum hanyalah merupakan salah satu upaya yang mendesak dilakukan karena masalah tersebut bersentuhan langsung dengan hukum. Namun bagaimanapun intensifnya penegakan hukum, kalau tidak diikuti upaya tindak lanjutnya oleh lembaga lain, hanya akan mencapai hasil yang temporer. Demikian komentar dari berbagai pakar disiplin ilmu menanggapi isue premanisme.

Pelaksanaan operasi terhadap para preman selama ini adalah merupakan upaya penegakan hukum yang lebih bersifat represif. Hanya sebagian kecil dari ribuan preman dapat dilakukan pembinaan oleh instansi terkait ataupun oleh masyarakat yang peduli, selebihnya belum ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu dalam rangka memperluas kegiatan upaya preventif, maka adanya potensi yang dimiliki para preman yang cenderung bergerak dalam bidang jasa keamanan, seharusnya dapat menimbulkan inspirasi bagi Polri untuk memanfaatkannya. Misalnya dalam konsep siskamling, Polri dapat menjadi mediator dalam pembentukan Satuan pengamanan (Satpam) di kawasan tertentu dengan merekrut para preman yang memenuhi syarat. Tentu saja dalam pelaksanaan selanjutnya perlu pengawasan dan pembinaan yang optimal melalui patroli dan Bimmaspol. Dengan cara semacam itu, paling tidak memiliki keuntungan ganda yaitu di samping dapat ikut mengatasi pengangguran juga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

(Penulis adalah Bintara Polwiltabes Bandung).